

EVALUASI PEMBANGUNAN ULANG KANTOR KECAMATAN TULUNG

Intan Widya Cahyani¹, Tri Mardiana², Abdul Yani Setiawan³
Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani Klaten
Email: intanwdy020@gmail.com

ABSTRACT (Evaluation of the Reconstruction of the Tulung District Office)

A sub-district office is a building intended to provide public services. Because public perception of the government is affected by poor public services, the reconstruction of infrastructure and facilities is very important to improve the quality of public services, this is guided by Law No. 28 of 2002 concerning Buildings. The Tulung District Office, which is one of the spearheads of public services at the sub-district level, must be able to provide the best service and meet the needs of residents quickly. Adequate physical condition of the building and good spatial planning will help create a comfortable and community-friendly workplace. The purpose of this study is to evaluate the development carried out by the government as a public service provider and find out what causes the success and failure of this development. This study uses a qualitative methodology that uses a phenomenological approach to collect data from interviews, observations, and document utilization. The results of the study show that, in addition to significantly reducing costs, the construction of the Tulung District Office Building has succeeded in improving facilities, infrastructure, and the quality of public services. However, development is still slow. However, the development carried out guided by Law No. 28 of 2002 will make the Tulung District environment more inclusive, competitive, and sustainable. This shows that the development evaluation is not successful. For future projects for the construction of the Tulung District Office Building, it is recommended to adjust the objectives to the needs of facilities and infrastructure, improve the quality of public services, maintain cost efficiency, improve project management to prevent delays, maintain the accuracy of the targets, and continue to optimize implementation to ensure inclusivity, competitiveness, and sustainability.

Keywords: Evaluation, Development, District Office

ABSTRAK (Evaluasi Pembangunan Ulang Kantor Kecamatan Tulung)

Kantor kecamatan adalah bangunan yang dimaksudkan untuk memberikan layanan publik. Karena persepsi masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi oleh pelayanan publik yang buruk, pembangunan ulang infrastruktur dan fasilitas sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik hal ini berpedoman dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kantor Kecamatan Tulung, yang merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik di tingkat kecamatan, harus mampu memberikan layanan terbaik dan memenuhi kebutuhan warga dengan cepat. Kondisi fisik bangunan yang memadai dan tata ruang yang baik akan membantu menciptakan tempat kerja yang nyaman dan ramah masyarakat. Tujuan penelitian ini mengevaluasi pembangunan yang dilakukan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dan mengetahui apa yang menyebabkan kesuksesan dan kegagalan pembangunan ini. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengumpulkan data dari wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selain menurunkan biaya secara signifikan, pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tulung berhasil meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas pelayanan publik. Namun, pembangunan masih lamban. Namun, pembangunan yang dilakukan berpedoman Undang-Undang No. 28 tahun 2002 akan membuat lingkungan Kecamatan Tulung lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi pembangunan tidak berhasil. Untuk proyek masa depan pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tulung, disarankan untuk menyesuaikan tujuan dengan kebutuhan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga efisiensi biaya, memperbaiki manajemen proyek untuk mencegah keterlambatan, mempertahankan ketepatan sasaran, dan terus mengoptimalkan pelaksanaan untuk memastikan inklusivitas, daya saing, dan keberlanjutan.

Kata-kata Kunci: Evaluasi, Pembangunan, Kantor Kecamatan

PENDAHULUAN

Kantor kecamatan adalah bangunan yang dirancang untuk menyelenggarakan atau menyediakan layanan publik. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan klien, layanan ini harus diberikan dengan cara yang tepat ramah, cepat, adil, dan bermoral (Hasanah, 2019). Ini dapat terjadi secara tidak langsung atau langsung. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik didefinisikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk, atau barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik (Kemenkumham, 2009).

Namun, menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan utama adalah ketepatan waktu, keadilan yang merata, keamanan, keterbukaan, efisiensi, dan kesederhanaan. Pelayanan publik yang buruk membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat yang menggunakan layanan publik merasa tidak terpuaskan dengan kondisi yang tidak memadai. Semua ini memengaruhi masyarakat umum, yang tidak mau berurusan dengan birokrasi pemerintah secara langsung. Jika pemerintah ingin menjalankan pelayanan publik berkualitas tinggi, mereka harus mengembangkan infrastruktur dan fasilitas yang sudah ada.

Pembangunan adalah perbaikan yang membawa sesuatu yang sudah ada ke tempat yang baru. Perbaikan, peremajaan, dan penyempurnaan biasanya dimaksudkan untuk pembangunan, terutama untuk bangunan dan infrastruktur. Pembangunan dapat dilakukan untuk berbagai alasan, seperti meningkatkan nilai properti, meningkatkan kenyamanan, dan kualitas hidup orang. Perencanaan yang cermat, penggunaan material berkualitas, dan kerja keras dari kontraktor diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan ini. Hal ini harus berpedoman dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Penyelenggaraan bangunan mencakup proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran (Morrow, 1981).

Pembangunan ulang adalah tanggapan terhadap berbagai situasi yang memerlukan perubahan besar pada lingkungan atau infrastruktur yang ada. Memperbaiki kondisi yang rusak atau tidak aman, seperti setelah bencana alam atau konflik bersenjata, adalah alasan utama untuk pembangunan ulang. Selain itu, pembangunan ulang juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengubah infrastruktur yang sudah usang atau tidak memadai menjadi lebih baik. Ini dapat mencakup pemulihan kawasan perkotaan yang terlantar untuk membuat lingkungan lebih produktif dan menarik bagi penduduk dan

investor. Pembangunan ulang sering kali bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah pola sosial dan ekonomi sebuah daerah, yang memberikan kesempatan baru bagi penduduk untuk hidup lebih baik dan berkelanjutan. Ini bukan satu-satunya tujuan dari pembangunan ulang.

Tujuan pembangunan ulang kantor kecamatan menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Kantor kecamatan berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan yang membantu koordinasi dan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Selain itu, kantor kecamatan memberikan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, pendaftaran usaha, izin tertentu, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi pembangunan Kantor Kecamatan sesuai dengan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur administrasi di tingkat kecamatan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan. Tujuan dari pembangunan gedung-gedung ini adalah untuk memastikan bahwa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan terjadi.

Kantor Kecamatan Tulung diharapkan sesuai pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung karena kondisi gedung mengalami banyak kerusakan, yang menyebabkan pegawai mengalami kesulitan dan menurunkan kualitas layanan publik. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 mengatur pemeliharaan dan perbaikan gedung. Peraturan ini memberikan landasan untuk perbaikan yang diperlukan ketika kondisi gedung mengalami kerusakan yang signifikan, seperti yang menyulitkan pekerjaan dan menurunkan kualitas layanan publik.

Proses perbaikan harus memperhatikan standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan dalam peraturan ini, sehingga gedung dapat berfungsi kembali dengan optimal untuk menyediakan layanan publik. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tidak hanya mengatur prosedur untuk membangun gedung baru, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas tentang pemeliharaan dan perbaikan gedung yang sudah ada untuk memastikan bahwa gedung tersebut tetap layak digunakan dan dapat memberikan layanan publik yang baik.

Kondisi Kantor Kecamatan Tulung sangat memprihatinkan. Atap di salah satu ruangan gedung berusia tua itu harus disangga dengan bambu agar tidak ambrol. Saat itu, ruangan disangga oleh tiga bambu. Saat hujan deras, air hujan juga masuk ke dalam ruangan. Selain itu, terlihat bahwa eternit di ruangan tersebut telah rusak. Sejak Februari 2021, ruangan tempat sembilan penyuluh pertanian tinggal disangga bambu kata Hendri Pamungkas, Pelaksana Tugas (PLT) Camat Tulung (Ponco Suseno, 2021). Dalam keadaan seperti ini,

menunjukkan betapa pentingnya melakukan pembangunan ulang Kantor Kecamatan Tulung dengan terencana.

Peneliti hendak meneliti Evaluasi Pembangunan Kabupaten Klaten dengan mengambil pembangunan dari Kantor Kecamatan Tulung mengingat masih banyak masyarakat sebagai pengguna layanan publik yang belum mengetahui tentang bagaimana evaluasi pembangunan yang dilakukan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dan mengetahui faktor yang mempengaruhi sukses dan kegagalan pembangunan ini. Akibatnya, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian "Evaluasi Pembangunan Ulang Kantor Kecamatan Tulung".

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi dapat diartikan sebagai proses perbaikan dikatakan suatu kegiatan yang dilakukan, seperti membandingkan hasil dari kegiatan yang telah direncanakan dan yang telah dilakukan sebelumnya dan yang telah dilakukan. Selain itu, evaluasi dapat didefinisikan sebagai pengumpulan informasi yang bermanfaat untuk menentukan nilai atau keuntungan suatu barang atau benda yang didasarkan pada referensi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Evaluasi menurut (Arif, 2019) adalah mengharuskan pimpinan bertanggung jawab untuk memproduksi hasil. Menurut (Nasihi & Hapsari, 2022) menyebutkan bahwa Kebijakan pendidikan pemerintah harus dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui seberapa tepat dan efektif hasilnya. Yaitu monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan pemerintah diperlukan untuk menentukan ketepatan dan kualitas hasilnya.

Evaluasi adalah tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilakukan untuk program pembangunan infrastruktur. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa berhasil program yang dilaksanakan, untuk menghasilkan ide-ide baru untuk perencanaan program yang akan datang. Ini berarti evaluasi digunakan sebagai dasar untuk mencapai infrastruktur yang lebih optimal (Hidayat, 2022).

Selain itu, evaluasi dilakukan untuk membantu pemimpin dalam membuat keputusan tentang program, personel, dan anggaran. Semua kegiatan membutuhkan evaluasi, terutama pembangunan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan. Jadi bisa diambil benang merah penelitian evaluasi adalah proses membuat kebijakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan keuntungan program, bersama dengan metode penelitian.

Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menegaskan bahwa masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan. Undang-undang ini menetapkan koordinasi antarinstansi terkait, seperti dinas tata ruang, dinas

pekerjaan umum, dan dinas lainnya, untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan gedung kecamatan dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Partisipasi masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam proses merancang gedung kecamatan agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan memenuhi standar yang berlaku.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 menekankan penggunaan energi dan lingkungan saat membangun gedung kecamatan. Ini termasuk penggunaan material bangunan yang berkelanjutan, pengoptimalan efisiensi energi, dan penerapan teknologi hijau untuk mengurangi dampak lingkungan dari proses pembangunan dan operasional gedung. Demikian pembangunan gedung kecamatan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung membutuhkan kepatuhan terhadap peraturan administratif dan teknis serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi yang baik antarinstansi terkait. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap gedung kecamatan yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsionalnya tetapi juga menambah nilai bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Banyak orang terlibat dalam proses perubahan sosial yang dikenal sebagai pembangunan. Tujuan pembangunan adalah untuk mendorong kemajuan sosial dan material bagi mayoritas orang melalui memperoleh kontrol yang lebih besar atas lingkungan mereka. Pembangunan pada dasarnya adalah upaya manusia untuk mengubah keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke tingkat kualitas yang dianggap lebih baik, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah pemerataan dalam mensejahterakan rakyat. Di negara berkembang, bagaimanapun fokus utama pembangunan adalah dilema antara pertumbuhan dan pemerataan, dengan pertumbuhan paling sering dibicarakan.

Pembangunan ulang bangunan, terutama kantor kecamatan, dilakukan karena beberapa alasan penting. Yang pertama adalah untuk memperbarui dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dan standar pelayanan publik yang terus berkembang. Bangunan yang sudah tua atau rusak membutuhkan perbaikan struktural untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna. Selain itu, pembangunan ulang memberikan kesempatan untuk menerapkan teknologi modern dan praktik desain berkelanjutan yang ramah lingkungan, yang meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak lingkungan. Terakhir, pemerintah dapat memperbarui fasilitas kantor untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan representatif. Ini akan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan.

Perencanaan pembangunan yang baik adalah rencana yang dapat menghasilkan hasil yang sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang dan dengan adanya rencana pembangunan yang efektif, masalah yang muncul selama proses perencanaan dan pembangunan dapat diselesaikan (Ra'is et al., 2020). Sehingga tercipta sinergi dan kesepakatan yang kuat, perencanaan pembangunan yang efektif melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka dipenuhi dengan baik, serta untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas hasil pembangunan.

Menurut (Lutfia Nur Aini, 2021) pembangunan kantor adalah proses pembangunan atau konstruksi gedung yang digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi administratif dan operasional suatu organisasi atau lembaga. Proses ini mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan dan perancangan, pembangunan fisik, dan pengaturan ruang di dalam gedung. Maka perlu adanya pembangunan ulang untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tulung

Kualitas Kantor dalam pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap seberapa efektif dan efisien layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, sebagai salah satu ujung tombak pelayanan publik di tingkat kecamatan, Kantor Kecamatan Tulung harus mampu memberikan layanan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan warga. Kondisi fisik bangunan yang memadai dan tata ruang yang baik membantu menciptakan tempat kerja yang nyaman dan ramah masyarakat.

Jika kondisi fisik bangunan tidak memenuhi standar yang dibutuhkan, pembangunan ulang diperlukan. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kerusakan struktural, lama bangunan, atau perubahan kebutuhan organisasi. Dengan pembangunan ulang, Kantor Kecamatan Tulung diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuat pegawai dan masyarakat merasa nyaman, dan menciptakan citra yang baik tentang pemerintah daerah.

Teori evaluasi yang digunakan oleh peneliti adalah teori dari Hidayat (2022), yang menyatakan bahwa evaluasi sebagai acuan kerja juga memungkinkan penggunaan data dan bukti yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan, digunakan dalam penelitian ini. Untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai memenuhi tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat, evaluasi yang didasarkan pada data empiris dapat membantu mengukur dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek infrastruktur.

Ada empat indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dan meminimalkan kesalahan pembangunan gedung Kecamatan Tulung yang terjadi selama

proses perencanaan memastikan bahwa rencana yang ditulis dalam dokumen akan terlaksana dengan baik, yang di kemukakan oleh (Ra'is et al., 2020) yaitu: (1) efektivitas berkaitan dengan opsi kebijakan alternatif untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki konsekuensi, (2) efisiensi berhubungan dengan jumlah upaya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektifitas tertentu, (3) tepat waktu maksudnya menyelesaikan tugas dalam waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan, (4) tepat sasaran berarti mencapai tujuan atau hasil dengan cara yang efisien dan efektif.

METODE PENELITIAN

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten diukur menggunakan metode kualitatif. Menurut (Ra'is et al., 2020) metode kualitatif adalah metode yang berasal dari positivisme, pendekatan kualitatif digunakan untuk menyelidiki objek alamiah. Pendekatan menggunakan pendekatan fenomenologi ini berupaya mengetahui suatu penelitian dengan membuat pertanyaan penelitian secara langsung. Metodologi penelitian kualitatif menekankan penggunaan alat dan teknik (Guba dan Lincoln, 1994: 4-7) dalam penelitian yang berorientasi pada paradigma alamiah. Dalam penelitian kualitatif, wawancara, pengamatan, dan penggunaan dokumen adalah metode yang paling umum digunakan. (Feny Rita Fiantika et all, 2022).

Subjek yang digunakan oleh peneliti adalah pengelola gedung Kantor Kecamatan Tulung. Peneliti juga menggunakan Gedung Kantor Kecamatan Tulung sebagai objek penelitian yang berlokasi di Jalan Raya Boyolali Km. 14, Sorogaten, Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57482 karena lokasi bisa menampung kegiatan kantor kecamatan, seperti ruang administrasi, ruang pertemuan, dan area layanan publik. Peneliti melakukan penelitian pada bulan Mei sampai Juli 2024 dengan menggunakan instrumen teknik wawancara dengan mengambil narasumber. Metode pengambilan sampel *purposive*, yang memilih sampel berdasarkan persyaratan tertentu dari Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) dan Subkoordinator Penyelenggaraan Gedung dan Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten Klaten yang terlibat langsung dalam proses pembangunan ulang.

Penelitian kualitatif berfokus pada kualitas data dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif emik, dan metode seperti wawancara dan observasi, serta analisis kualitatif. Setelah pengambilan sampel dan pengumpulan data untuk penelitian atau pembangunan gedung kantor kecamatan di Tulung, langkah selanjutnya adalah analisis data. Tujuan analisis data adalah untuk menemukan temuan utama, yaitu dengan memahami

masalah yang dihadapi, dan membuat rekomendasi yang relevan. Ini termasuk menemukan pola atau tema yang muncul dari catatan observasi atau transkrip wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan ulang dilakukan pada bangunan tua, infrastruktur yang usang, atau area yang terkena bencana alam untuk memulihkan atau meningkatkan kondisi yang ada. Ini termasuk memperbaiki kerusakan, meningkatkan efisiensi, atau modernisasi. Kantor Kecamatan Tulung dibangun ulang dari bulan Januari hingga Desember Tahun 2022. Kantor ini terletak di Sorogaten, Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57482. Peneliti mengevaluasi pembangunan yang dilakukan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dengan menggunakan indikator seperti efektivitas, efisiensi, ketepatan waktu, dan ketepatan sasaran. Tujuan dari evaluasi pembangunan ulang Kantor Kecamatan Tulung adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pembangunan tersebut.

Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan efisiensi tertentu. Secara khusus, efektivitas menggambarkan seberapa baik suatu tindakan, proses, atau strategi dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup tidak hanya pencapaian hasil, tetapi juga relevansi dan signifikansi dari hasil tersebut terhadap tujuan awal. Dengan kata lain, efektivitas mengukur sejauh mana suatu usaha atau kegiatan dapat memberikan nilai atau manfaat yang diinginkan dengan metode yang paling efisien dan efektif mungkin

Dalam penelitian ini indikator efektivitas digunakan karena kondisi gedung yang sudah tidak layak mengharuskan dilakukannya pembangunan ulang secara menyeluruh. Sebelum dilakukan pembangunan, tentunya sebuah pembangunan harus memiliki tujuan yang jelas. Seperti yang dinyatakan oleh Catur Wulan Damar Waskito, S.T selaku Subkoordinator Penyelenggaraan Gedung dan Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten Klaten, bahwa tujuan dari pembangunan Kantor Kecamatan Tulung untuk menjawab kebutuhan sarana dan prasarana serta pelayanan publik tingkat kecamatan. Bangunan yang lama tidak sesuai dengan standar pelayanan saat ini. Contohnya seperti E-KTP atau layanan pajak di kecamatan dan perbankan sehingga memerlukan alat yang memadai. Sehingga dalam proses pelayanan publik ada perbedaan standar pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pada masa kini dan masa depan.

Gedung ini tidak hanya menawarkan fasilitas modern yang memenuhi standar terbaru, tetapi juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasi pemerintahan. Untuk memastikan

bahwa layanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan responsif, telah ditambahkan fasilitas yang lebih canggih, seperti teknologi informasi yang canggih, ruang rapat yang dilengkapi dengan peralatan modern, dan peningkatan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Selain itu, perhatian diberikan pada lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi karyawan, yang mencakup ruang kerja yang ergonomis, tempat tidur yang nyaman, dan lingkungan yang mendorong kerjasama dan kreativitas. Diharapkan bahwa kondisi kerja yang lebih baik meningkatkan semangat karyawan dan mengurangi tingkat stres dan kelelahan yang dapat memengaruhi kinerja mereka.

Masyarakat yang menggunakan layanan dan pengalaman mereka juga menjadi perhatian utama. Pelanggan diharapkan lebih puas dengan fasilitas seperti area tunggu yang ramah dan informatif, pemandu yang bersahabat, dan sistem antrian yang efisien. Semua perbaikan ini dilakukan untuk memastikan bahwa gedung fasilitas atm, E-KTP, pelayanan pajak. Kantor baru tidak hanya menjadi tempat administrasi tetapi juga menjadi pusat pelayanan yang memberikan nilai lebih bagi masyarakat dengan menawarkan layanan yang mudah diakses dan pengalaman pengguna yang baik.

Indikator efektivitas dinyatakan berhasil karena tujuan pembangunan gedung Kantor Kecamatan Tulung memenuhi kebutuhan prasarana yang memadai dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Gedung baru juga mengatasi keterbatasan dan kekurangan fasilitas di gedung lama yang tidak lagi memenuhi standar pelayanan saat ini. Kantor kecamatan dapat bekerja lebih efisien dan efektif, sehingga masyarakat dapat menerima layanan dengan lebih cepat, tepat, dan nyaman. Selain itu, Kantor yang baru menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi petugas, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja mereka dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang mereka berikan.

Efisiensi

Konsep efisiensi sangat penting dalam banyak aspek kehidupan dan bisnis. Efisiensi dalam bisnis biasanya diukur dalam hal produktivitas, kualitas hasil, dan kemampuan untuk bersaing di pasar secara berkelanjutan. Secara umum, efisiensi mengacu pada kemampuan untuk mencapai hasil tujuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling efektif, yang mengurangi pemborosan dan biaya. Penggunaan prinsip efisiensi juga dapat mengarah pada inovasi dan pengembangan produk dan layanan yang lebih baik untuk pelanggan.

Dalam penelitian ini indikator efisiensi merujuk pada kemampuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang minimal. Seperti yang disampaikan oleh Catur Wulan Damar Waskito, S.T selaku Subkoordinator Penyelenggaraan Gedung dan

Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten Klaten, bahwa pengendalian spek teknis dalam indikator efisiensi sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengendalian spek teknis didatangkan dari dinas atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) menyewa konsultan manajemen konstruksi untuk mengendalikan mutu, waktu, biaya, dan manfaat.

Kaitannya dengan asas manfaat, PPKom menggandeng tim yang kuat supaya mengarahkan kontraktor menjaga empat asas tersebut. Regulator menyewa atau memihak ketigakan dalam proses perencanaan dengan konsultan perencana profesional. Dalam kasus Kecamatan Tulung perencanaan menentukan anggaran dilakukan oleh pihak ketiga konsultan untuk membantu proses perencanaan karena regulator tidak terfokus di Kecamatan Tulung namun pada tahun yang sama Kecamatan Ceper juga dalam masa pembangunan.

Dilakukannya lelang untuk mendapatkan kontraktor yang menawarkan hasil yang efisien. Pihak lelang menginginkan pekerjaan tersebut sehingga mereka menawarkan sampai mereka menganggap dari anggaran yang ada dapat diambil keuntungan yang wajar. Lelang menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah Kabupaten Klaten untuk mendapatkan kontraktor dengan harga yang murah yang sudah dikoreksi oleh panitia lelang atau UPBJ (Unit Pelayanan Barang dan Jasa).



**Gambar 1. Dokumen Gambar DED Perencanaan
Bangunan Kantor Kec. Tulung**

Konsultan melakukan survey dan menyusun program seperti program ruang dan kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Tulung. Selain itu konsultan membuat gambar dan menghitung RAB sehingga mendapatkan hasil seperti Gambar 1. Dari hasil perhitungan RAB, konsultan menyimpulkan total anggaran yang kemudian bisa disampaikan kepada tim penganggaran. Hal ini dilakukan proses pengendalian oleh pihak DPU-PR yang berikat kerjasama dengan CV kontraktor sesuai nilai kontrak dengan aturan-aturan tertentu. Pengendalian ini dilakukan sesuai dengan SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) dan SSK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

No.	MACAM PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL (Rp.)
A	PEKERJAAN SMKK	26.644.500,00
B	PEKERJAAN PERSIAPAN	7.100.000,00
C	BANGUNAN KANTOR LANTAI DASAR	
I	PEKERJAAN TANAH	42.805.918,31
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	604.461.814,44
III	PEKERJAAN BETON	1.248.261.334,47
IV	PEKERJAAN TANGGA BETON	84.020.848,39
V	PEKERJAAN LANTAI	254.314.311,41
VI	PEKERJAAN PLAFOND	61.646.271,76
VII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	197.158.348,42
VIII	PEKERJAAN PARTISI	154.578.565,05
IX	PEKERJAAN CAT - CATAN	67.668.789,23
X	PEKERJAAN SANITASI	67.530.389,00
XI	PEKERJAAN LISTRIK	93.958.777,64
XII	PEKERJAAN FURNITURE	21.549.378,34
D	BANGUNAN KANTOR LANTAI ATAS	
I	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	300.306.596,90
II	PEKERJAAN BETON	644.608.453,96
III	PEKERJAAN LANTAI	176.570.951,50
IV	PEKERJAAN PLAFOND	100.106.750,11
V	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	166.659.589,31
VI	PEKERJAAN PARTISI	131.322.644,94
VII	PEKERJAAN CAT - CATAN	48.958.443,45
VIII	PEKERJAAN SANITASI	61.993.505,97
IX	PEKERJAAN LISTRIK	67.664.595,62
X	PEKERJAAN ATAP	853.140.201,57
E	BANGUNAN RUMAH DINAS	
I	PEKERJAAN TANAH	5.026.892,44
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	94.565.369,68
III	PEKERJAAN BETON	64.102.596,11
IV	PEKERJAAN LANTAI	33.755.122,95
V	PEKERJAAN PLAFOND	10.244.175,15
VI	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	59.506.312,61
VII	PEKERJAAN CAT - CATAN	16.833.659,58
VIII	PEKERJAAN SANITASI	6.969.970,38
IX	PEKERJAAN LISTRIK	11.262.021,55
X	PEKERJAAN ATAP	117.195.559,76

Gambar 2. RAB Kecamatan Tulung 2022

No.	MACAM PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL (Rp.)
F	PEKERJAAN PRASANA LINGKUNGAN	
I	PRASARANA LINGKUNGAN	282.486.193,01
II	PEKERJAAN PAGAR KELLING SAMPING DAN BELAKANG	171.503.177,74
III	PEKERJAAN PAGAR DEPAN DAN PAPAN NAMA	75.571.637,57
	JUMLAH	6.422.904.268,92
	PPN 11%	706.519.469,58
	TOTAL	7.129.423.738,51

Gambar 3. RAB Kecamatan Tulung 2022

Pada Gambar 2 dan 3 dapat kita lihat Untuk pembangunan gedung Kecamatan Tulung, Rencana Anggaran Biaya (RAB) awalnya menetapkan anggaran sebesar 7,129.423.738,51 untuk memenuhi berbagai biaya penting proyek, seperti biaya bahan material, upah tenaga kerja, biaya operasional, dan pengeluaran tak terduga lainnya. Estimasi anggaran ini telah dibuat dengan teliti dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan kebutuhan lokal.

Meskipun demikian, proses penawaran dilakukan selama tahap pelaksanaan, yang melibatkan beberapa kontraktor yang terkenal dan memiliki pengalaman dalam proyek yang sebanding. Untuk menjamin pengeluaran yang paling efisien, prinsip transparansi dan kompetisi yang sehat digunakan selama proses penawaran. Setelah berbagai evaluasi dan perundingan yang mendalam, akhirnya salah satu kontraktor memberikan penawaran dengan harga yang jauh lebih rendah dari perkiraan awal.

Pihak kontraktor tersebut menawarkan harga total proyek sebesar Rp5.000.000.000, 00. Biaya yang sangat rendah ini disebabkan oleh beberapa hal. Ini termasuk penggunaan bahan yang lebih efisien, teknik kerja yang lebih efisien, dan kemampuan kontraktor untuk

mengelola proyek dengan biaya yang lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas. Dengan demikian, anggaran dihemat sebesar Rp2.129.423.738, 51.

Pemerintah daerah mendapat manfaat besar dari penghematan ini. Dana yang telah dihemat dapat digunakan untuk keperluan penting lainnya, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang lebih baik di daerah lain, atau bahkan dialokasikan untuk program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat secara langsung. Selain itu, proses penawaran yang kompetitif ini diharapkan juga menjadi model yang baik untuk mengelola anggaran proyek pemerintah di masa depan, memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan dengan hati-hati dan efisien.

Keberhasilan dalam negosiasi biaya ini juga menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, termasuk pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proyek memastikan bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat Kecamatan Tulung.

Berdasarkan analisis, indikator efisien berhasil dalam penurunan biaya yang cukup besar. Pihak kontraktor akhirnya memberikan penawaran harga sebesar Rp5.000.000.000, 00 setelah berbagai negosiasi dan evaluasi. Karena penurunan biaya ini menghasilkan penghematan anggaran lebih dari dua milyar rupiah, pemerintah daerah pasti nantinya mendapatkan keuntungan besar. Pengeluaran ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak lainnya, seperti meningkatkan infrastruktur atau layanan publik di seluruh Kecamatan Tulung. Diharapkan proses penawaran yang transparan dan kompetitif ini nantinya menjadi contoh yang baik untuk pengelolaan anggaran proyek pemerintah berikutnya.

Tepat Waktu

Dalam suatu pembangunan, tepat waktu mengacu pada kemampuan untuk menyelesaikan proyek atau aktivitas pembangunan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting dalam industri konstruksi dan pembangunan infrastruktur karena keterlambatan penyelesaian proyek dapat menyebabkan biaya tambahan, kerugian keuangan, dan konsekuensi negatif lainnya seperti penundaan manfaat proyek yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja dan produktivitas adalah ketepatan waktu. Tepat waktu diukur dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu proses dengan waktu standar yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Catur Wulan Damar Waskito, S.T selaku Subkoordinator Penyelenggaraan Gedung dan Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten Klaten, bahwa pada pembangunan, pemerintah membatasi tahun anggaran yaitu satu tahun.

Proses perencanaan ditetapkan waktu pembangunan sesuai dengan hasil yang telah disepakati bersama oleh pihak regulator dan kontraktor yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Proses Pembangunan

No	Waktu	Kegiatan
1.	Januari – Maret	Perencanaan
2.	Maret – Mei	Lelang
3.	Mei - November	Pembangunan
4.	November - Desember	Evaluasi

Tabel 1 menunjukkan dengan jelas bahwa perencanaan proyek dijadwalkan pada bulan Januari dan berlangsung hingga Maret, dan mencakup berbagai tugas seperti menentukan kebutuhan, menganggarkan, dan menyiapkan dokumen tender. Pada bulan Maret hingga Mei, proses lelang dijadwalkan, di mana pengumuman lelang dilakukan, para kontraktor mengajukan penawaran mereka, dan setelah penawaran diterima, evaluasi dilakukan dan pemenang diputuskan.

Pengawasan lapangan, penjaminan kualitas, dan pelaksanaan konstruksi adalah bagian dari proses pembangunan yang dijadwalkan pada bulan Mei dan berlangsung hingga November. Kontraktor bekerja sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak, dan proyek dipantau secara berkala. Terakhir, proses evaluasi dijadwalkan pada bulan November hingga Desember, yang mencakup penilaian pekerjaan selesai, pemeriksaan apakah proyek sesuai dengan rencana awal, dan penyusunan laporan akhir. Proses ini memastikan bahwa semua tujuan proyek telah tercapai dan bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan metode yang memuaskan.

Untuk memastikan bahwa semua perhitungan dan perjanjian telah matang dengan baik, diperlukan waktu satu tahun dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Metode ini memungkinkan proses pembangunan dilakukan dengan cepat dan efisien. Dengan tahapan ini, tidak hanya dimungkinkan untuk menyusun rencana secara menyeluruh, tetapi juga dimungkinkan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek telah mencapai kesepakatan dan memahami sesuatu yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, keselarasan antara perencanaan yang cermat dan evaluasi yang menyeluruh sangat penting untuk mencapai tujuan proyek.

Tabel 2. Realisasi Pembangunan

No	Waktu	Kegiatan
1.	Januari - April	Perencanaan

2.	April – Juni	Lelang
3.	Juni - November	Pembangunan
4.	November - Desember	Evaluasi

Dinamika yang menarik dalam jadwal proyek ditampilkan dalam Tabel 2. Awalnya, proses perencanaan tertunda satu bulan, yang menyebabkan pergeseran dari Januari hingga April. Namun, proses lelang tetap berjalan sesuai jadwal selama dua bulan, yaitu April dan Juni. Menariknya, pembangunan yang awalnya dijadwalkan selama enam bulan dari Juni hingga Desember, berhasil diselesaikan lebih cepat dalam lima bulan saja, dari Juni hingga November. Proses pembangunan ini menghadapi berbagai kendala pada tahap perencanaan, lelang, dan proses pengambilan keputusan.

Pada Tabel 2, bisa kita lihat bahwa terjadi keterlambatan dalam tahap perencanaan dan lelang mengakibatkan perubahan durasi pada tahap pembangunan, yang berdampak pada keseluruhan efisiensi waktu proyek. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah administrasi, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, atau kendala teknis yang tidak terduga. Masalah dalam tahap perencanaan bisa jadi disebabkan oleh revisi dokumen perencanaan yang memerlukan persetujuan tambahan atau oleh permasalahan internal yang menghambat kelancaran proses.

Dalam tahap lelang, keterlambatan bisa disebabkan oleh proses seleksi kontraktor yang lebih lama dari perkiraan, mungkin karena adanya penawaran yang tidak memenuhi kriteria atau negosiasi kontrak yang berkepanjangan. Pada tahap pembangunan, meskipun durasinya dipersingkat menjadi lima bulan, efisiensi waktu harus tetap diperhatikan agar kualitas dan hasil pekerjaan tidak menurun. Pembangunan yang dilakukan dalam waktu yang lebih singkat memerlukan manajemen proyek yang lebih ketat, alokasi sumber daya yang optimal, serta pemantauan progres yang lebih intensif untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana.

Keterlambatan dalam proyek konstruksi adalah masalah besar yang memiliki dampak yang signifikan. Ketika tahap pembangunan tidak berjalan sesuai jadwal, ada banyak konsekuensi yang merugikan. Secara finansial, keterlambatan ini biasanya berarti biaya tambahan yang signifikan untuk perpanjangan kontrak, biaya tambahan untuk sumber daya tambahan, atau denda keterlambatan yang harus dibayar. Tekanan untuk mempercepat proses juga dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan, yang pada akhirnya dapat mengurangi keandalan dan keamanan hasil akhir proyek.

Hasil penelitian evaluasi pembangunan gedung Kecamatan Tulung menunjukkan indikator tepat waktu tidak berhasil karena terjadinya keterlambatan penyelesaian pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Catur Wulan Damar Waskito, S.T selaku

Subkoordinator Penyelenggaraan Gedung dan Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten Klaten, bahwa pembangunan gedung mengalami keterlambatan selama dua minggu. Pada proses pembangunan didapati proses perencanaan mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan perencanaan dan pembangunan.

Tepat Sasaran

Untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan mencapai hasil yang diharapkan dengan efisiensi maksimal, pendekatan pembangunan tepat sasaran sangat penting. Sejak awal, hal ini dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan dapat diukur. Rencana kerja dapat dibuat dengan baik dengan tujuan yang jelas. Dalam pendekatan ini, pengelolaan sumber daya sangat penting karena penggunaan yang efektif dari sumber daya manusia, finansial, dan materiil dapat meningkatkan kelancaran dan kesuksesan proyek.

Dalam penelitian ini Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, indikator yang tepat sasaran menunjukkan tingkat keberhasilan dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung operasional pemerintahan di tingkat kecamatan. Gedung kecamatan bukan hanya tempat administrasi tetapi juga tempat penting untuk mengatur pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Berbagai unit kerja di kecamatan dapat berinteraksi dan berkolaborasi secara efektif, yang mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan, berkat fasilitas yang baik dan terorganisir dengan baik.

Seperti yang dikatakan Beni Agustian, S.T, M.M selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR), bahwa respon masyarakat antusias dan mulai berdampak terkait kepuasan yang dilihat dari IKM pembangunan Gedung Kecamatan Tulung yang tinggi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tinggi menunjukkan reaksi positif masyarakat terhadap pembangunan Gedung Kecamatan Tulung, yang dianggap sebagai pusat administrasi pemerintahan dan simbol perbaikan pelayanan publik dan kualitas hidup di tingkat lokal. IKM yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan fasilitas yang disediakan, yang membantu meningkatkan aksesibilitas. Oleh karena itu, pembangunan Gedung Kecamatan Tulung bukan hanya meningkatkan operasi pemerintahan secara langsung, tetapi juga meningkatkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi seluruh masyarakat kecamatan.

Dengan memberikan akses yang lebih baik ke layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, gedung kecamatan yang representatif dan berfungsi dengan baik juga membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan lokal. Secara keseluruhan, gedung kecamatan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara

keseluruhan, pengukuran yang tepat sasaran dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 adalah ukuran keberhasilan dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung pemerintahan yang efektif dan responsif di tingkat kecamatan, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas tinggi untuk warga kecamatan.

Hasil penelitian evaluasi pembangunan gedung Kecamatan Tulung menunjukkan indikator tepat sasaran berhasil karena dalam pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung dapat dilihat tidak hanya dalam bentuk gedung itu sendiri, tetapi juga bagaimana lingkungan sekitarnya berubah menjadi lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di seluruh kecamatan Tulung. Tingkat IKM yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasakan peningkatan kualitas dan akses layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Dengan memberikan fasilitas yang lebih baik dan mendorong partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan lokal, gedung ini juga memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, ketepatan waktu, dan ketepatan sasaran yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pembangunan Gedung Kecamatan Tulung. Untuk proyek ini berhasil, ini berarti semua tujuan pembangunan dari segi fungsi dan estetika harus tercapai dengan maksimal. Efisiensi berarti penggunaan sumber daya, waktu, dan biaya yang optimal sehingga proyek tidak terbuang. Ketepatan sasaran berarti pembangunan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan perencanaan awal, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengikuti pedoman undang-undang ini memastikan bahwa bangunan tidak hanya aman dan layak huni tetapi juga memenuhi standar kualitas dan regulasi pemerintah.

Perencanaan yang memakan waktu lama adalah komponen penting yang dapat menyebabkan penundaan yang signifikan dalam memulai dan menyelesaikan proyek. Selain itu, situasi dapat menjadi lebih buruk jika perencanaan tidak dapat disesuaikan dengan perubahan, terutama jika desain atau strategi pelaksanaan harus diubah selama proyek berlangsung. Selain itu, perubahan harga bahan bangunan dan tenaga kerja menjadi tantangan besar. Perubahan harga yang tidak terduga dapat mengakibatkan anggaran proyek melebihi perkiraan awal, memaksa penyesuaian atau bahkan penundaan proyek karena kekurangan modal.

Faktor penting lainnya adalah masalah keuangan kontraktor. Keterbatasan modal juga dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan karena kontraktor mungkin terpaksa menggunakan bahan berkualitas rendah atau mengurangi tenaga kerja untuk menghemat uang. Jika

kontraktor kehabisan modal, mereka nantinya kesulitan menyelesaikan proyek sesuai jadwal, yang dapat mengakibatkan penghentian proyek. Kesuksesan proyek pembangunan Gedung Kecamatan Tulung dapat dipengaruhi oleh perencanaan yang lamban, perubahan harga yang tidak terduga, dan masalah keuangan kontraktor. Untuk mengatasi masalah ini, semua pihak yang terlibat harus memiliki strategi mitigasi risiko, cadangan anggaran, dan komunikasi yang efektif. Ini nantinya memungkinkan proyek berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.

KESIMPULAN

Hasil penelitian Evaluasi Pembangunan Ulang Kantor Kecamatan Tulung menunjukkan bahwa indikator efektivitas dan efisiensi dinyatakan dengan berhasil karena tujuan pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tulung telah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, biaya telah dikurangi secara signifikan dan modal dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Selain itu indikator ketepatan sasaran dinyatakan berhasil karena Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengubah lingkungan di sekitar Kecamatan Tulung menjadi lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Namun, hasil penelitian Evaluasi Pembangunan Ulang Kantor Kecamatan Tulung menunjukkan bahwa indikator ketepatan waktu tidak berhasil karena pembangunan tertunda.

Saran untuk proyek masa depan untuk pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tulung. Pertama, untuk menjaga efektivitas, penting untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan selalu sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menjaga efisiensi yang ketat dan menemukan cara untuk mengurangi biaya untuk kebutuhan tambahan harus menjadi prioritas utama. Namun, disarankan untuk indikator tepat waktu dengan meningkatkan manajemen proyek dan perencanaan dengan membuat jadwal yang lebih realistis, menemukan dan mengelola risiko yang dapat menyebabkan keterlambatan, dan meningkatkan koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam proyek. Selain itu, indikator ketepatan sasaran yang berhasil harus dipertahankan. Untuk memastikan bahwa pembangunan di Kecamatan Tulung tetap inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung harus terus dioptimalkan.

REFERENSI

- Arif, M. T. (2019). Penelitian evaluasi pendidikan. *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 66–75.
- Dokumen gambar DED perencanaan bangunan Kantor Kecamatan Tulung. (n.d.).
- Fiantika, F. R., et al. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 105–117). SAGE Publications.
- Hidayat, R. Al. (2022). Evaluasi pembangunan infrastruktur jaringan irigasi di Kabupaten Bengkulu Tengah. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 334–347. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1840>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Sekretariat Negara.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori pembangunan ekonomi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), 95–112. <https://doi.org/10.24042/revenue.v2i2.9071>
- Nur Aini, L. (2021). *Analisis renovasi pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang Pasar Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo* (Skripsi sarjana). IAIN Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13646/>
- Nasihi, A., & Hapsari, T. A. R. (2022). Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. *Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)*, 1(1), 77–88. <https://journals.eduped.org/index.php/intel/article/view/112>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung.
- Suseno, C. I. S. P. (2021, April 21). Memprihatinkan, gedung Kecamatan Tulung disangga bambu. *Solopos*. <https://soloraya.solopos.com/memprihatinkan-gedung-kecamatan-tulung-disangga-bambu-1120168>
- RAB Kecamatan Tulung. (2022).
- Ra'is, D. U., Setyawan, D., & Dimus, Y. (2020). Efektivitas perencanaan pembangunan daerah Kota Batu. *Reformasi*, 10(2), 228–235. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1910>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung.